



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, serta untuk memenuhi kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyesuaikan Biaya Perjalanan dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2004 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 3) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah Propinsi Bengkulu bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, terdiri dari:
  - a. uang harian (uang saku, uang transport lokal dan uang makan);
  - b. biaya Penginapan;
  - c. biaya transport;
  - d. uang representasi; dan
  - e. sewa Kendaraan dalam kota.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah;
  - b. tingkat B : Pejabat Eselon II dan pejabat lainnya yang setara;
  - c. tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV
  - d. tingkat D : Pejabat Eselon IV/Golongan III
  - e. tingkat E : Staf Golongan II/I.
- (3) Dihapus.
- (4) Uang harian (uang saku, uang transport lokal dan uang makan), biaya transport dari/ke bandara dan uang representasi diberikan secara lumpsom.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk tiket pesawat udara dan *airport tax* diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata (*at cost*) dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dengan klasifikasi tiket tarif Bisnis.
  - b. bagi Pejabat Eselon II, Eselon III/Staf Golongan IV, Eselon IV/ Staf Golongan III dan Golongan II dengan klasifikasi tiket tarif Ekonomi.
  - c. bagi PNS Golongan II diberikan 1 (satu) kali penerbangan (*one way*) dari Bengkulu ke tempat tujuan.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (5) huruf b dan c di atas, untuk kurir/ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas kedinasan yang bersifat sangat mendesak, harus persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi.

## LAMPIRAN III

## PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

## NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR  
17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BENGKULU

## 1. Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah (Batas tertinggi, At Cost )

NO	TUJUAN	Transport ( dari Bengkulu) PP	
		Bisnis ( Rp )	Ekonomi ( Rp)
1	Jakarta	4,364,000	2,621,000
2	Bandung via Jakarta	7,930,000	3,850,000
3	Semarang via Jakarta	9,500,000	4,540,000
4	Solo via Jakarta	9,500,000	4,540,000
5	Surabaya via Jakarta	10,000,000	5,000,000
6	Yogyakarta via Jakarta	9,840,000	4,620,000
7	Balikpapan via Jakarta	10,930,000	5,550,000
8	Ambon via Jakarta	18,000,000	8,900,000
9	Banjarmasin via Jakarta	10,890,000	5,300,000
10	Kendari via Jakarta	13,160,000	6,410,000
11	Kupang via Jakarta	14,800,000	7,250,000
12	Palangkaraya via Jakarta	10,650,000	5,290,000
13	Banda Aceh via Jakarta	13,030,000	6,700,000
14	Batam via Jakarta	10,550,000	5,200,000
15	Medan via Jakarta	12,780,000	6,060,000
16	Padang via Jakarta	11,170,000	5,260,000
17	Palembang via Jakarta	9,610,000	4,620,000
18	Pekan Baru via Jakarta	11,220,000	5,230,000
19	Pangkal Pinang via Jakarta	9,190,000	4,500,000
20	Jambi via Jakarta	10,080,000	4,950,000
21	Bandar Lampung via Jakarta	8,250,000	3,980,000
22	Biak via Jakarta	19,150,000	9,530,000
23	Denpasar via Jakarta	10,960,000	5,550,000
24	Gorontalo via Jakarta	12,760,000	7,010,000
25	Jayapura via Jakarta	19,620,000	10,160,000
26	Makasar via Jakarta	12,960,000	6,080,000
27	Manado via Jakarta	16,170,000	7,270,000
28	Manokwari via Jakarta	21,170,000	12,370,000
29	Mataram via Jakarta	10,970,000	5,520,000
30	Palu via Jakarta	14,740,000	7,280,000
31	Ternate via Jakarta	15,350,000	8,780,000
32	Pontianak via Jakarta	10,070,000	5,100,000
33	Samarinda via Jakarta	10,930,000	5,550,000
34	Tanjung Pinang ( Kepri ) via Jakarta	11,220,000	5,230,000

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IKHWAN.SH.,MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001

(7) Rincian biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD dan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

(8) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(3) Besaran biaya perjalanan dalam daerah untuk Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu dalam rangka pemeriksaan reguler dan khusus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Lampiran I dan II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14-1-2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 14-1-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR  
 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
 DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI BENGKULU

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	PROPINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	Aceh	OH	360,000	110,000
2	Sumatera Utara	OH	370,000	110,000
3	Riau	OH	370,000	110,000
4	Kepulauan Riau	OH	370,000	110,000
5	Jambi	OH	370,000	110,000
6	Sumatera Barat	OH	380,000	110,000
7	Sumatera Selatan	OH	380,000	110,000
8	Lampung	OH	380,000	110,000
9	Bengkulu	OH	-	110,000
10	Bangka Belitung	OH	410,000	120,000
11	Banten	OH	370,000	110,000
12	Jawa Barat	OH	430,000	130,000
13	DKI Jakarta	OH	530,000	160,000
14	Jawa Tengah	OH	370,000	110,000
15	DI. Yogyakarta	OH	420,000	130,000
16	Jawa Timur	OH	410,000	120,000
17	Bali	OH	480,000	140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	130,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	130,000
20	Kalimantan Barat	OH	380,000	110,000
21	Kalimantan Tengah	OH	360,000	110,000
22	Kalimantan Selatan	OH	380,000	110,000
23	Kalimantan Timur	OH	430,000	130,000
24	Kalimantan Utara	OH	430,000	130,000
25	Sulawesi Utara	OH	370,000	110,000
26	Gorontalo	OH	370,000	110,000
27	Sulawesi Barat	OH	410,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	430,000	130,000
29	Sulawesi Tengah	OH	380,000	110,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380,000	110,000
31	Maluku	OH	380,000	110,000
32	Maluku Utara	OH	430,000	130,000
33	Papua	OH	580,000	170,000
34	Papua Barat	OH	480,000	140,000

2. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Gub/Wagub, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250,000	125,000
2.	Pejabat Eselon I	OH	200,000	100,000
3.	Pejabat Eselon II	OH	150,000	75,000


GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
 M. IKHWAN. SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR  
 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
 DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI BENGKULU

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				Gol I/II
			Gub/Wagub, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekda	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III	
1	Aceh	OH	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	370,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,214,000	703,000	505,000	310,000
3	Riau	OH	3,817,000	1,168,000	868,000	450,000	380,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,285,000	650,000	502,000	280,000
5	Jambi	OH	4,000,000	1,176,000	697,000	382,000	290,000
6	Sumatera Barat	OH	4,240,000	1,155,000	884,000	477,000	370,000
7	Sumatera Selatan	OH	4,680,000	1,228,000	605,000	514,000	310,000
8	Lampung	OH	3,960,000	1,299,000	790,000	374,000	356,000
9	Bengkulu	OH	1,300,000	790,000	712,000	599,000	510,000
10	Bangka Belitung	OH	3,335,000	1,310,000	850,000	533,000	304,000
11	Banten	OH	3,808,000	1,430,000	1,024,000	797,000	400,000
12	Jawa Barat	OH	3,664,000	1,753,000	949,000	515,000	463,000
13	DKI Jakarta	OH	8,720,000	1,086,000	800,000	610,000	400,000
14	Jawa Tengah	OH	4,146,000	1,478,000	1,024,000	497,000	350,000
15	DI. Yogyakarta	OH	4,620,000	1,334,000	747,000	629,000	461,000
16	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,359,000	841,000	499,000	329,000
17	Bali	OH	4,881,000	1,810,000	1,304,000	904,000	658,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3,429,000	2,738,000	737,000	540,000	360,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,000,000	700,000	662,000	400,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,400,000	1,130,000	866,000	430,000	361,000
21	Kalimantan Tengah	OH	3,000,000	1,596,000	923,000	558,000	436,000
22	Kalimantan Selatan	OH	4,250,000	1,670,000	816,000	500,000	379,000
23	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
24	Kalimantan Utara	OH	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
25	Sulawesi Utara	OH	3,200,000	1,553,000	640,000	549,000	342,000
26	Gorontalo	OH	1,320,000	1,134,000	910,000	423,000	242,000
27	Sulawesi Barat	OH	1,260,000	1,030,000	910,000	425,000	360,000
28	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,912,000	968,000	539,000	378,000
29	Sulawesi Tengah	OH	2,030,000	1,298,000	804,000	493,000	389,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1,850,000	1,070,000	802,000	488,000	420,000
31	Maluku	OH	3,000,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
32	Maluku Utara	OH	3,110,000	1,512,000	600,000	478,000	380,000
33	Papua	OH	2,850,000	1,668,000	754,000	460,000	414,000
34	Papua Barat	OH	2,750,000	1,482,000	976,000	798,000	370,000

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN. SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001



LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

1. Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan dan Transport Perjalanan Dinas dalam Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	Besaran Biaya Ke Kabupaten		
			Uang Harian	Batas Tertinggi Biaya Penginapan/hari (At Cost)	Transport Darat, Laut, Udara dan Sewa Kendaraan
1.	Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah	OH	150,000	800,000	
2.	Pejabat Eselon II	OH	150,000	500,000	AT COST
3.	Pejabat Eselon III/Gol IV	OH	150,000	400,000	
4.	Pejabat Eselon IV /Gol III	OH	150,000	350,000	
5.	Pegawai Gol II/I	OH	150,000	250,000	

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN. SH.,MH

Pembina Tk.I

NIP. 19690905 199403 1 001